

BERITA KEKERASAN DI MEDIA MASSA*

Oleh Ashadi Siregar

1. Berita (*news-story*) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi, mulai dengan cara mengambil salah satu unsur kelayakan berita (*newsworthy*) seperti kebaruan (*newness*), atau penting (*significance*), atau dengan formula simpel "K" seperti konflik, kantong (uang) dan kelamin (sex). Semua ornamen teknis untuk memproduksi berita itu bisa ditinggalkan, untuk masuk ke substansi jurnalisme, bahwa berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial inilah kemudian ditampilkan di media massa. Dengan begitu motif khayal dalam menghadapi media massa khususnya media jurnalisme adalah untuk mendapatkan fakta sosial. Ini dapat dilihat dari sejauh mana wacana fakta sosial identik dengan wacana fakta media. Untuk itu, prinsip pertama dalam jurnalisme adalah **obyektivitas**, mengasumsikan bahwa khayal media menuntut agar wacana (*discourse*) yang tertangkap dari suatu berita (fakta media), diharapkan identik dengan wacana fakta sosial. Kecermatan (*accuracy*) sebagai landasan kerja jurnalisme dimaksudkan untuk menjaga agar wacana fakta media, persis alias identik dengan fakta sosial.
2. Prinsip kedua dalam jurnalisme adalah **keseimbangan** dan **keberpihakan**. Ini dua sisi mata koin dari kerja jurnalisme, yang satu menjadi penyebab lainnya. Keseimbangan menjaga ketidak-berpihakan, ketidak-seimbangan menjadikan keberpihakan, begitu bertimbang-balik. Mana yang lebih dulu, rasanya tidak perlu dicari jawabannya. Yang penting keduanya perlu diperhadapkan dengan dua dimensi dalam kerja jurnalisme yaitu fakta sosial dan fakta media.
3. Keseimbangan dan keberpihakan dapat dilihat dari kandungan dan konteks dari fakta sosial. Anatomi fakta sosial pada dasarnya menyangkut person yang berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih) di dalam struktur sosial. Posisi setiap person dapat seimbang jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan ini dapat berupa kekuatan fisik, kekuasaan negara, kekuasaan modal/ ekonomi, atau pun kekuasaan kultural/komunalisme. Perspektif struktural menjadikan setiap fakta sosial diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang mengalami marginalisasi.
4. Fakta kekerasan (*violence*) merupakan salah satu dimensi fakta sosial. Secara sederhana kekerasan dapat dilihat dari penggunaan cara fisik dalam menyelesaikan konflik antar perorangan. Dengan begitu ada konflik yang melatar interaksi, sehingga dari aksi satu pihak, menjadikan pihak lainnya korban. Dengan begitu fakta ini selamanya terdiri atas dua pihak, pelaku dan korban (*victim*), masing-masing dapat berupa perorangan atau kolektif, terjadi secara fisik maupun non-fisik (psikologis). Pelaku melakukan kekerasan fisik atau non-fisik, sedang korban mengalami penderitaan fisik atau non-fisik. Pengertian yang luas semacam ini tidak ada maknanya dalam analisis sosial, karenanya perlu ditempatkan dalam perspektif struktural.

* Disampaikan pada SEMINAR KEKERASAN DALAM MASYARAKAT, PEMBERITAAN MEDIA SEPUTAR KEKERASAN DAN KEKERASAN OLEH MEDIA MASSA, Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM), Makassar 25 – 26 November 1999

5. Kekerasan dapat dibedakan dari hakekatnya yaitu sebagai interaksi tidak seimbang di antara pihak-pihak dalam suatu fakta sosial. Suami memukul isterinya, mungkin bagi sebagian orang dipandang sebagai bentuk pendidikan dari sang imam. Tetapi dengan perspektif gender, aksi suami itu dipandang sebagai kekerasan, sebab secara struktural sang suami dalam posisi hegemonik, dan isteri tidak berdaya (*powerless*). Perspektif gender tidak melihat suami dengan kekuatan fisiknya, tetapi keberadaannya dalam konstruksi sosial yang menempatkan dirinya dalam posisi hegemonik. Konstruksi sosial ini selamanya berada pada salah satu atau lebih ruang kekuasaan negara, modal, atau komunal. Dengan demikian fakta kekerasan dilihat dalam konteks struktural, dimana salah satu pihak memiliki kekuasaan lebih. Kekuatan fisik belum menjadi kekuasaan hegemonik, sepanjang tidak memiliki kaitan dengan kekuasaan negara, ekonomi atau komunalisme.
6. Jurnalis tidak pernah bercerita tentang kondisi struktural. Dia hanya berurusan dengan fakta-fakta sosial bersifat empiris. Fakta kekerasan merupakan fakta sosial bersifat mikro, sementara konteks struktural bersifat makro. Fakta media hanya akan menceritakan fakta sosial mikro, sehingga konteks struktural ini hanya menjadi perspektif, bukan menjadi fakta empiris. Dengan kata lain, perspektif struktural menjadi ruang intelektual bagi seorang jurnalis, yang di dalam ruang ini fakta sosial ditaruh untuk diteropongnya. Fakta kekerasan dalam fakta sosial menantang jurnalis dengan sejumlah gugatan: Bagaimakah obyektivisasi dijalankan dalam memaparkan kekerasaan dalam fakta sosial yang tidak seimbang? Mungkinkah bersikap netral saat menghadapi kekerasan dalam fakta sosial ketidak-seimbangan? Bagaimakah jurnalis mewujudkan fakta sosial yang tidak seimbang itu dalam hasil kerjanya?
7. Metode jurnalisme memproses fakta sosial sebagai fakta media, untuk mencapai identiknya masing-masing wacana. Dengan demikian saat menerima fakta kekerasan dalam media, khalayak akan menerima wacana yang sama atas fakta sosial kekerasaan. Karenanya apakah media melakukan kekerasan? Jika wacana suatu fakta media identik dengan fakta sosialnya, maka mungkin media disebut sebagai cermin yang jernih memantulkan bayangan fakta sosial. Tetapi mungkinkah jurnalis sedemikian sempurna menjalankan metode jurnalisme, sehingga setiap ceritanya tentang fakta sosial, sepenuhnya menangkap wacana fakta tersebut, sekaligus tidak terkontaminasi oleh kecenderungan-kecenderungan manusiawi sang jurnalis? Kecenderungan manusiawi ini antara lain kepentingan sendiri (*vested interest*), ideologi, keterpaksaan, atau kelemahan teknis seperti kegagapan dixi. Dalam obyektivitas dalam kerja jurnalisme, fakta media diharapkan tidak menghianati fakta sosial.
8. Dari sini keseimbangan dan keberpihakan dilihat pada fakta media. Keseimbangan dan ketidak-berpihakan, atau keberpihakan dan ketidak-seimbangan dalam fakta media ditentukan oleh perspektif yang mendasari sikap jurnalis. Perspektif ini mencakup sudut pandang (*angle*), posisi jarak (*distance*), dalam menghadapi fakta sosial, dan bahasa yang digunakan jurnalis dalam fakta media. Sudut pandang merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi fakta, yaitu saat menentukan subyek yang dipilih sebagai fokus perhatian (*focus of interest*). Sedangkan posisi jarak adalah sikap sosial jurnalis dalam menghadapi subyek, mulai dari netral, antipati, empati, ataukah simpati, dan sikap intelektual jurnalis apakah *apriori* ataukah *aposteriori*. Bahasa menyangkut pilihan kata dalam merekonstruksikan fakta sosial, dapat mewujud melalui pernyataan langsung person dalam fakta sosial, narasumber, atau melalui narasi jurnalis atas fakta sosial.

9. Cerita dibangun dengan bertitik tolak dari subyek yang dipilih, dan dari dirinya fakta direkonstruksikan. Dalam merekonstruksikan ini jurnalis memerlukan adanya narasumber (*resources person*). Alasan memilih pihak tertentu sebagai subyek cerita, maupun person tertentu sebagai narasumber tidak pernah dipertanggungjawabkan dalam karya jurnalisme. Mungkin pertanggungjawaban diberikan pada saat rapat internal di ruang redaksi (*editorial room*), bukan kepada masyarakat. Ada kalanya reportase diberi pengantar catatan redaksi, yang menjelaskan alasan-alasan dalam perspektif yang digunakan dalam liputan dan penulisan, tetapi ini jarang terjadi. Khalayak dianggap akan menerima begitu saja setiap proses jurnalisme yang berlangsung. Ini yang membedakan metode jurnalisme dengan metodologi penelitian sosial. Keduanya mungkin saja menghadapi fakta sosial yang sama. Tetapi peneliti sosial harus memaparkan alasannya dalam memilih suatu sasaran sebagai subyek kajian, sekaligus tentang penentuan narasumber (istilah metodologi: responden) bagi rekonstruksi sosial yang dilaporkannya. Alasan ini dapat berkorelasi dengan konteks obyektif akademik, sampai yang bersifat subyektif dari diri peneliti.
10. Keseimbangan dan keberpihakan yang terkandung dalam fakta media dilihat melalui indikator yang bersifat manifest/eksplisit, tidak yang bersifat tersembunyi/implisit. Keseimbangan antara lain terlihat dari posisi struktural pelaku dan/atau narasumber dan berapa banyak pelaku dan/atau narasumber dari masing-masing pihak. Karenanya konvensi dalam jurnalisme untuk mencantumkan atribusi narasumber akan menentukan identifikasi ini. Sedangkan keberpihakan tercermin antara lain dari pilihan subyek dalam judul, *lead* dan penutup (*ending*), serta cakupan keluasan rekonstruksi versi fakta dari narasumber dari masing-masing pihak.
11. Kekerasan pada tataran fakta sosial dapat muncul sebagai fakta media. Ini antara lain mewujud melalui tindakan (kekerasan fisik), dan secara verbal (kekerasan non-fisik). Tindakan kekerasan fisik mudah diidentifikasi melalui penderitaan dari korban, mulai dari pengasingan, sakit sampai kematian. Dengan begitu kekerasan fisik dijalankan dengan yang paling lunak berupa tindakan segregasi, dan pada tingkat ekstrim berupa pembunuhan.
12. Sedangkan kekerasan secara verbal dapat diidentifikasi dari pilihan kata konotatif berkonteks permusuhan atau penghukuman, yang digunakan oleh pelaku sehingga menempatkan korban pada posisi tidak berdaya. Kata konotatif yang mengandung kekerasan, menjadi dasar dalam sistem kategorisasi sosial bersifat segregasi terhadap korban, atau mengandung acuan moral sebagai dasar pemberian tindakan kekerasan (fisik). Pilihan kata (diksi) dalam fakta media tampil dalam dua cara, pertama sebagai kalimat langsung dari narasumber, dan kedua melalui narasi oleh jurnalis.
13. Diksi melalui cara pertama seolah bersifat obyektif, sebab merekonstruksikan fakta sosial secara otentik. Tanggungjawab atas pernyataan sepenuhnya berada pada diri narasumber. Jurnalis hanya sebagai pencatat. Tetapi jika fakta kekerasan ini berada pada dataran yang mencerminkan ketidak-seimbangan, dengan sendirinya obyektivitas kehilangan makna. Obyektivitas hanya dapat berjalan secara penuh pada dataran keseimbangan interaksi (*equality*). Sementara cara yang kedua pada dasarnya mengambil alih kekerasan non-fisik narasumber, ini mencerminkan bahwa jurnalis sepenuhnya ikut sebagai bagian dari kekerasan yang dilakukan oleh narasumbernya. Kekerasan non-fisik mengandung muatan konseptual yang bersifat tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dengan begitu media ikut bersama-sama melakukan kekerasan.
14. Fakta media memang hasil kerja person jurnalis, karenanya asumsi dasar yang digunakan adalah setiap jurnalis bekerja dalam kaidah yang berlaku di institusi medianya. Karenanya setiap fakta media, kendati ditera sebagai karya by-line,

dianggap mencerminkan kecenderungan institusional. Dalam menghadapi kekerasan sebagai fakta media, dapat dilakukan dalam dua macam pendekatan metodologis. Pertama dengan metode analisis isi (*content analysis method*), untuk melihat kecenderungan sikap media dalam menghadapi fakta sosial. Metode kuantitatif dengan data empirisisme ini dapat diandalkan untuk menguji kecenderungan media dalam keberadaan institusionalnya. Kedua adalah dengan metode analisis wacana (*discourse analysis*) untuk melihat kecenderungan media dalam menyampaikan kekerasan non-fisik yang terwujud melalui kata langsung dari narasumber maupun narasi oleh jurnalis. Secara metodologis, eksplorasi dunia bahasa konotatif yang bersifat simbolik lebih tepat dengan pendekatan kualitatif dalam analisis wacana. Dengan begitu kekerasan fisik dapat diukur melalui prinsip logiko-empirisisme, sedang kekerasan non-fisik yang diwujudkan dalam dunia simbolik didekati dengan prinsip rasionalisme.